



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 44), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Oktober 2021

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
KERJA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEMESTA
BERENCANA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUSI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
2.1 Capaian kinerja dan keuangan.....	9
2.2 Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.....	23
BAB III MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	25
BAB V P E N U T U P	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Perubahan RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan kedua tahun berjalan, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Perubahan RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Perubahan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Penyusunan Renja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan kedua

tahun berjalan, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, review rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan penelaahan kebijakan nasional serta refocusing anggaran.

Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai salah satu OPD di Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu Rencana Kerja dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dan Renja dimaksud seperti (1) penyesuaian tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus dipergunakan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana

- Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 43).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.

- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan perubahan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar seksi pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Kinerja dan Keuangan

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2021 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2021. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan Badan Penghubung. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian sasaran Badan Penghubung yang tertuang dalam dokumen Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan sampai triwulan II Tahun 2021 secara keseluruhan realisasi

kinerja yang dilaksanakan oleh Subbid di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali telah mencapai IKM 89,71 dengan realisasi keuangan mencapai 43,63% (diluar belanja Gaji dan Tunjangan ASN). Semua program dan kegiatan pada triwulan I dapat berjalan sesuai target. Namun pada triwulan II ada beberapa tahap rasionalisasi yang secara signifikan dengan bulan April 2021 sehingga merubah target kinerja dan keuangan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Berikut rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing program dan kegiatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan pemerintahan							
	Bidang Urusan koordinasi dengan pemerintah pusat							
	Program Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah (Prioritas)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	75	85,96	114%			
	Pagelaran seni budaya	Jumlah pagelaran dan pameran	1 kali pagelaran 1 kali pameran kuliner 1 kali pagelaran pekan HUT TMI	0 (semua anggaran di rasionalisasi)	100%			
	Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya	Jumlah seminar	2 kali seminar	1 kali seminar (rasionalisasi)	100%			
	Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin pimpinan daerah	Kelancaran pelayanan pimpinan	Pelayanan pimpinan selama 1 tahun	12 bulan	100%			
	Program Peningkatan akuntabilitas capaian kinerja (rutin)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80	80.16	100%			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran penggunaan listrik, telepon dan internet	12 bulan	12 bulan	100%			

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gedung kantor yang bersih	12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan ATK	Kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bangunan gedung kantor dengan penerangan yang cukup	12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan yang mendukung aktivitas kantor	12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang mendukung kelancaran kegiatan	12 bulan	12 bulan	100%			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Koordinasi dan konsultasi berjalan lancar	12 bulan	12 bulan	100%			
	Upacara keagamaan	Upacara keagamaan untuk mendukung kelancaran kantor	12 bulan	12 bulan	100%			

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang mendukung kegiatan	12 bulan	12 bulan	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terawat	12 bulan	12 bulan	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Kendaraan dinas yang terawat optimal dan prima	13 unit	13 unit	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terawat	12 bulan	12 bulan	100%			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Akses disabilitas di Anjungan Bali	1 paket	1 paket	100%			
	Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	Dokumen Perencanaan yang lengkap	1 dokumen	1 dokumen	100%			
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kelancaran pembayaran PBB dan iuran-uran RT	12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan bahan logistic kantor	Pengisian tabung pemadam	12 bulan	12 bulan	100%			

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung				80	89,71	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung				80	89,71	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta				2 kali pembinaan	1 kali pembinaan (rasionalisasi)	
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah pagelaran seni, jumlah pameran kuliner, latihan tari Bali				1 kali pagelaran 12 kali pelatihan tari Bali	1 kali pagelaran 6 kali pelatihan tari Bali (Rasionalisasi)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik				12 bulan	6 bulan (Rasionalisasi)	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				82	belum ada nilai LKjIP	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat				7 dokumen	5 dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD				1 dokumen	- dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD				1 dokumen	- dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi				12 dokumen	6 dokumen	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		keuangan						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan				18 PNS	18 PNS	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi				12 dokumen	6 dokumen	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD				12 dokumen	6 dokumen	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan				1 dokumen	- dokumen	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor 1				12 bulan	6 bulan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor				5 jenis	5 jenis	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				3 jenis	3 jenis	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan				1 jenis	1 jenis	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen				5 jenis	5 jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran				12 bulan	6 bulan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dan jumlah makanan dan minuman untuk koordinasi dan konsultasi				12 bulan	6 bulan	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah				8 unit	4 unit (rasionalisasi)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor				8 unit	4 unit (rasionalisasi)	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 bulan	6 bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang				12 bulan	6 bulan	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dibayar tepat waktu						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu				12 bulan	6 bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu				12 bulan	6 bulan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah				12 bulan	6 bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik				13 unit	13 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik				12 bulan	6 bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik				12 bulan	6 bulan	

Tabel

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan setelah rasionalisasi triwulan II

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu	Realisasi Triwulan 1		Realisasi Triwulan 2	
			Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,116,400,799	1.063.376.676,00 (17,38%)	Blm ada nilai LKjIP	2.653.039.419,00 (43,37%)	Blm ada nilai LKjIP
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,618,700	4,618,700,00 (100%)	57%	4.618,700,00 (100%)	85%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,748,400	3.748.400,00 (100%)	1 dok	3.748.400,00 (100%)	2 dok
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dok		1 dok
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 dok
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 dok		1 dok
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	870,300	870.300,00 (100%)	1 dok	870.300,00 (100%)	1 dok
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,036,436,703	706,082,562,00	37%	1.748.646.894,00	50%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,034,871,603	704.517.462,00 (17,46%)	18 PNS	1.747.081.794,00 (43,29%)	18 PNS
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	870,300	870.300,00 (100%)	3 dok	870.300,00 (100%)	6 dok
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	694,800	694.800,00 (100%)	3 dok	694.800,00 (100%)	6 dok
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143,119,300	40.592,900,00 (28,36%)	65%	62.029.600,00 (43,34%)	73%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	10,482,000	10.482.000,00 (100%)	5 jenis	10.482.000,00 (100%)	5 jenis

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,947,000	14.947.000,00 (100%)	3 jenis	14.947.000,00 (100%)	3 jenis
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,000,000	12.298.000,00 (15,37%)	1 jenis	22.246.000,00 (27,80%)	1 jenis
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	4,892,300	2.135.900,00 (43,65%)	5 jenis	2.441.200,00 (49,89)	5 jenis
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,340,000	730.000,00 (31,19%)	3 bln	1.825.000,00 (77,99%)	6 bln
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,458,000		3 bln	10.088.400,00 (33,12%)	6 bln
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,982,000			75.981.999,00 (100%)	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,982,000			75.981.999,00 (100%)	4 unit
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,014,027,784	158,606,846,00 (15,64%)	25%	391.938.135,00 (38,65%)	50%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,643,800	3.278.300,00 (58,08%)	3 bln	3.930.300,00 (69,63%)	6 bln
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000	32.458.094,00 (16,22%)	3 bln	71.317.258,00 (35,65%)	6 bln
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	808,383,984	122.870.452,00 (15,19%)	3 bln	316.690.577,00 (39,17)	6 bln
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842,216,312	153.475,668,00 (18,22%)	36%	369.824.091,00 (43,91%)	60%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	730,457,540	132.297.172,00 (18,11%)	6 unit	318.102.432,00 (43,54%)	9 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,000,000	7.250.000,00 (20,71%)	3 bln	20.500.000,00 (58,57%)	6 bln
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76,758,768	13.928.496,00 (18,14%)	3 bln	31.221.659,00 (40,67%)	6 bln
2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	945,273,840	175.182.482,00 (18,53%)	86,47 IKM	414.693.300,00 (43,87%)	89,71 IKM
G	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	945,273,840	175.182.482,00 (18,53%)	86,47 IKM	414.693.300,00 (43,87%)	89,71 IKM
	Peningkatan Kualitas	36,560,000	36.450.000,00	1 kali	36.450.000,00	1 kali

	Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		(100%)		(100%)	
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	128,718,768	9.428.496,00 (7,32%)	3 bln	64.174.659,00 (49,85%)	1 kali 6 bln
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	779,995,072	129.303.986,00 (16,57%)	3 bln	314.068.641,00 (40,26%)	6 bln
		7.061.674.639,00	1.238.559.158,00		3.067.732.719,00	

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 diatas, terdapat beberapa kegiatan yang terkena rasionalisasi/refocusing untuk penanganan pandemi Covid 19 baik kegiatan/Sub kegiatan rutin maupun prioritas Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Penghubung sesuai dengan sasaran Renstra dan Renja Tahun 2021 sampai dengan triwulan II yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali telah mencapai nilai IKM 89,71 dapat di rinci sebagai berikut :

1. IKM Penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga : 94,40 (sangat baik)
2. IKM Penerima pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung : 92,51 (baik)
3. IKM Pelanggan wisma Badan Penghubung : 74.47 (kurang baik)
4. IKM Pengunjung Anjungan Daerah Bali TMII : 97,44 (sangat baik)

TABEL

Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2021

No	Program	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi potensi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	80	89.71
		Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		94.40
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		92.51
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		97.44
		Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		74.47

2.2 Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut

Secara umum beberapa faktor penghambat kinerja program/kegiatan adalah

:

1) Sumber Daya Manusia belum memadai

Secara kuantitas dan kualitas tenaga PNS maupun tenaga kontrak di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

2) Sarana dan Prasarana belum memadai

Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan alat transportasi yang memadai, sarana promosi dan informasi berupa replika budaya dan seni, pamflet/brosur, VCD seni dan budaya. Dan anggaran untuk menyelenggarakan pagelaran seni secara rutin.

Pemeliharaan terhadap sarana wisma dan pemeliharaan bangunan di Anjungan Bali belum maksimal karena terkendala anggaran pemeliharaan.

3) Jumlah kamar/wisma dan bangunan wisma yang sudah tidak representatif sehingga tidak dapat bersaing dengan city hotel yang telah banyak dibangun di sekitar wisma

4) Adanya rasionalisasi anggaran yang signifikan sehingga membuat rencana dan target yang mendukung pelaksanaan pelayanan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, perlu ditetapkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi dan informasi hasil pembangunan daerah Bali melalui pemeran kerajinan dan ekonomi serta pertunjukan/pagelaran-pagelaran kesenian.
3. Melaksanakan pembangunan gedung kantor dan wisma yang baru sesuai dengan dokumen perencanaan (DED) yang telah dibuat (tergantung arahan Bappeda terkait alokasi anggaran).
4. Mengajukan anggaran yang sangat urgent dibutuhkan di APBD perubahan 2021 untuk kelancaran pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

BAB III

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan penguatan anggaran dalam rangka penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan social safety net/jaring pengaman social sebagai akibat pandemi COVID-19, maka dilakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk dapat menunda anggaran yang tidak mendesak. Kebijakan tersebut menyebabkan perlu dilakukan perubahan capaian target kinerja dan pendanaan pada beberapa kegiatan yang sebelumnya telah disusun pada Renja Badan Penghubung Induk Tahun 2021.

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 meliputi hal-hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penyesuaian terhadap target kinerja sub kegiatan berdasarkan realisasi dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2021;
3. Rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak prioritas mendesak.

Perubahan anggaran pada program/kegiatan pembangunan pada pada rancangan akhir perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel Renja Perubahan keluaran SIPD (terlampir).

Pada perubahan APBD 2021 Badan Penghubung telah disetujui untuk menambah anggaran sesuai nota dinas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang telah dikompulir di Subbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Bali untuk dapat diberikan tambahan sesuai dengan skala prioritas. Adapun pengajuan nota dinas penambahan anggaran Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

Nota dinas Nomor : 900/ 600 /TU/BPPROV tanggal 19 Maret 2021 usulan penambahan anggaran berupa :

Mohon Tambahan Anggaran Untuk Penyesuaian Upah Tenaga Kontrak Badan Penghubung dengan UMP DKI pada DPPA TA 2021 sejumlah Rp. 12.259.836 (Dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)

Selain Penambahan Anggaran, Badan Penghubung Provinsi Bali juga telah melaksanakan rasionalisasi sebanyak Rp. 1.185.156.426 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), sebagai upaya untuk membantu Pemprov Bali mengurangi defisit anggaran.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertamba (Berkuran)			
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah		
9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20											
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	07					PENGELOLAAN PENGHUBUNG																
5	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
5	07	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
5	07	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9,210,000	0	0	0	9,210,000	3,748,400	0	0	0	3,748,400	(5.461.1)
5	07	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				870,300	0	0	0	870,300	0	0	0	0	0	(870.0)
5	07	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				870,300	0	0	0	870,300	0	0	0	0	0	(870.0)
5	07	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				870,300	0	0	0	870,300	0	0	0	0	0	(870.0)
5	07	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				870,300	0	0	0	870,300	0	0	0	0	0	(870.0)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertamba (Berkuran)	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		870,300	0	0	0	870,300	870,300	0	0	0	870,300		
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,759,607,465	0	0	0	4,759,607,465	4,036,436,703	0	0	0	4,036,436,703	(723.170.:	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,757,172,065	0	0	0	4,757,172,065	4,034,871,603	0	0	0	4,034,871,603	(722.300.:	
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		870,300	0	0	0	870,300	870,300	0	0	0	870,300		
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			694,800	0	0	0	694,800	694,800	0	0	0	694,800		
5	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		870,300	0	0	0	870,300	0	0	0	0	0	0	(870.:
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				213,432,600	0	0	0	213,432,600	143,119,300	0	0	0	143,119,300	(70.313.:	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,482,000	0	0	0	10,482,000	10,482,000	0	0	0	10,482,000		
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,674,300	0	0	0	30,674,300	14,947,000	0	0	0	14,947,000	(15.727.:	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertamba (Berkuran)
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,138,300	0	0	0	8,138,300	4,892,300	0	0	0	4,892,300	(3.246.1
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	2,340,000	0	0	0	2,340,000	(2.660.1
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79,138,000	0	0	0	79,138,000	30,458,000	0	0	0	30,458,000	(48.680.1
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	131,682,000	0	0	0	131,682,000	0	75,982,000	0	0	75,982,000	(55.700.0
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	131,682,000	0	0	131,682,000	0	75,982,000	0	0	75,982,000	(55.700.1
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,020,181,100	0	0	0	0	1,020,181,100	1,014,027,784	0	0	0	1,014,027,784	(6.153.3
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,700,000	0	0	0	7,700,000	5,643,800	0	0	0	5,643,800	(2.056.1

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertamba (Berkuran)
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		812,481,100	0	0	0	812,481,100	808,383,984	0	0	0	808,383,984	(4.097.
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			955,820,500	0	0	0	955,820,500	842,216,312	0	0	0	842,216,312	(113.604.1	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		806,495,800	0	0	0	806,495,800	730,457,544	0	0	0	730,457,544	(76.038.:
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114,324,700	0	0	0	114,324,700	76,758,768	0	0	0	76,758,768	(37.565.:
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			1,152,545,900	0	0	0	1,152,545,900	945,273,840	0	0	0	945,273,840	(207.272.:	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			1,152,545,900	0	0	0	1,152,545,900	945,273,840	0	0	0	945,273,840	(207.272.:	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,102,400	0	0	0	94,102,400	36,560,000	0	0	0	36,560,000	(57.542.:

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertamba (Berkuran)
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149,744,700	0	0	0	149,744,700	128,718,768	0	0	0	128,718,768	(21.025.1
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Badan Penghubung)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		908,698,800	0	0	0	908,698,800	779,995,072	0	0	0	779,995,072	(128.703.1

BAB V

PENUTUP

Dengan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Penghubung Provinsi Bali, diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan penerima pelayanan. Selanjutnya Renja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, top-down dan bottom-up diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penerima pelayanan di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Provinsi Bali dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai pelayanan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2018-2023.